

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung, Anak Agung Putu & Anik Yuesti. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bali: CV Noah Aletheia, 2019.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bappeda Kota Pekalongan. *Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026*. Pekalongan: Pemerintah Kota Pekalongan, 2021.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2020.
- Kansil & Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Mardiasmo. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.
- Rahayu, Ani Sri *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Hukum, Teori, dan Aplikasinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.

JURNAL/ARTIKEL

- Abidin, Benny & Ratna Herawati. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang." *Jurnal Law Reform*. Vol. 14. No. 2. 2018. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20872>.
- Ardiansyah, dkk. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif ". *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 25. 2023. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57/30>.
- Azahra, Alma & Fauzi Arif Lubis. "Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5. No. 3. 2021. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324/2019>.
- Dhesinta, Wafia Silvi. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)." *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4. No. 1. 2016. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578>.
- Ernayani, Rihfenti. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*. Vol. 1. No. 1. 2017. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>.
- Fitriyanti, Nur Ika & Herniati Retno Handayani. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)." *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol. 9. No. 2. 2022. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>.
- Haryati, Dedeh. "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Kajian*. Vol. 15. No. 3. 2010. <https://doi.org/10.22212/kajian.v15i3.581>.
- Kariem, M. Qur'anul. & Titin Purwaningsih. "Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Pelaksanaan Keistimewaan." *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 9. No. 2. 2018. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.61-81>.

- Ma'arij, Aman & Sukirman. "Implikasi Yuridis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*. Vol. 9. No. 1. 2020. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.12>.
- Ma'ruf, Muhammad Farid. "Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol. IV. No. 1. 2019. <http://jakp.fisip.unand.ac.id>.
- Nuh, Muhammad Syarif. "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 41. No. 1. 2012. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4159/21916>.
- Saleh, M. dkk. "Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD." *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*. Vol. 7. No. 1. 2021. <https://doi.org/10.29303/jseh.v7i1.97>.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif". *Makara, Sosial Humaniora*. Vol. 9. No. 2. 2005. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=hubasia>.
- Supryadi, Ady. "Urgensi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah". *Unizar Recht Journal*. Vol. 1. No.3. 2022. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/26/1>.
- Wardana, Wahyu Surya, dkk. "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Perkembangan Perekonomian Pasca Pandemi COVID-19 Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Archipelago Barenlitbang Kepri*. Vol. 1. No. 1. 2022. <https://doi.org/10.69853/ja.v1i1.2>.
- Wiguna, Putu Gede Satya, dkk. "Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" *Jurnal Prefensi Hukum*. Vol. 5. No. 2. 2024. <https://ejournalwarmadewa.id/index.php/juprehum/article/view/8091/5971>.
- Wijayanto, Hendra. "Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance)." *Jurnal UTA'4 Jakarta*. Vol. 1. No. 1. 2015. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.79>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

SUMBER LAIN

Tim Komunikasi Publik. "Geografi" Pemerintah Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html>. Diakses pada 3 Februari 2024.

Darmawan, Agus Dwi. "Data 2024: Jumlah Penduduk Kota Pekalongan 318,18 Ribu Jiwa" Databoks Katadata.co.id, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/ef91f26eecaa898/data-2024-jumlah-penduduk-kota-pekalongan-318-18-ribu-jiwa>. Diakses pada 2 Februari 2024.

DPRD Kota Pekalongan. "Anggota Dewan". <https://dprd-pekalongankota.go.id/front/site/anggota>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1



Foto bersama Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Bapak Nur Priyantomo, S. E., M.M.

Lampiran 2



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Jl. Mataram No. 3 Pekalongan Kode Pos 51111 Telepon (0285) 421984
Email : petwankotapekalongan@pekalongankota.go.id

Nomor: B/0243/400.14.5.4/2025

Perihal: Surat Keterangan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Kota Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menerangkan bahwa:

Nama : Laisla Bonita

NIM : 11000121120164

Alamat : Jl. Pelita 1 Kradenan Gg.3 RT 001/008 No. 111, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Nomor HP : 081326404134

Bidang Minat : Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan penelitian skripsi wawancara di Instansi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan pada tanggal 13 Januari 2025 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024".

Demikian surat keterangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Ketua DPRD Kota Pekalongan,



Mohamad Azmi Basyir, S.T., M.Sc.

Surat Keterangan Riset dari DPRD Kota Pekalongan